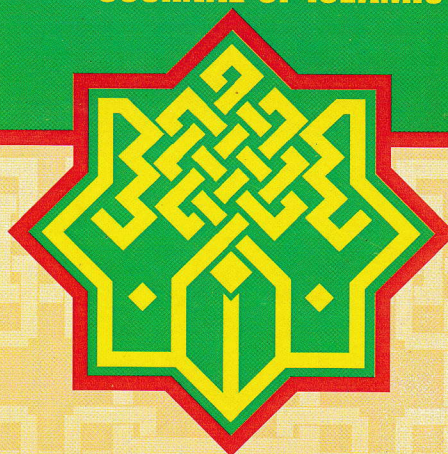


ISSN : 1411 - 2922

DINIKA

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

Volume 13. Number 1, Jan - Jun 2015

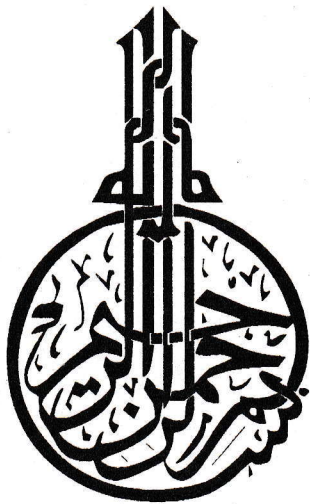


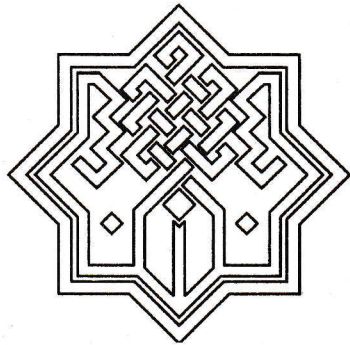
**MODERASI ISLAM UPAYA PENCARIAN PERAN PTAI
DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA**

**PEMIKIRAN FILSAFAT IBNU BAJJAH DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PERKEMBANGAN SAINS**

**MODEL-MODEL KAJIAN ISLAM DAN SAINS
DALAM LITERATUR INDONESIA KONTEMPORER**

THE STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN)
SURAKARTA - INDONESIA





DINIKA

**JOURNAL OF ISLAMIC
STUDIES**

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Imam Sukardi, M. Ag

PIMPINAN REDAKSI
Dr. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag

SEKRETARIS REDAKSI
Nur Muhlashin, S.Psi., M.A

DEWAN REDAKSI
Dr. Nurisman, M.Ag
H.M. Syakirin Al Gozaly, M.A., Ph.D
Dr. Purwanto, M.Pd
Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag
Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, M.A

TATA USAHA
Nur Asyik Nahroni, S.Ag., M.M.
Any Rahmawati, S.Pd.



DINIKA : Journal of Islamic Studies is published twice a year in January and July by the State Islamic Institute of Surakarta (IAIN Surakarta). It specialized in Islamic studies This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines

MAILING ADDRESS

Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura 57168 Sukoharjo Indonesia
Telp. 0271-781516 Fax.0271-782774
E-mail : dinika@iain-surakarta.co.id

Table Of Contents

- 1.) MODERASI ISLAM UPAYA PENCARIAN PERAN PTAI DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA
Didin Nurul Rosidin 6-21
- 2.) PEMIKIRAN FILSAFAT IBNU BAJJAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN SAINS
Kasmuri 23-33
- 3.) MODEL-MODEL KAJIAN ISLAM DAN SAINS DALAM LITERATUR INDONESIA KONTEMPORER
Irfan Abu Nazar 35-50
- 4.) KOMODIFIKASI DALAM PENYIARAN ISLAM DI TV
(Studi Kasus pada Acara "Islam itu Indah" dan "AA' dan Mamah")
Agus Wahyu Triatmo 51-65
- 5.) PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
Hesti Sadtyadi 67-81
- 6.) MACRO LINGUISTICS APPLIED BRANCHES: TRANSLATION AND MEANING
Any Rahmawati 83-94
- 7.) KEARIFAN LOKAL PESANTREN
Nur Sidik 95-107
- 8.) JALAN SUFI PANEMBAHAN SENOPATI MENGENAL ALLAH
Kholilurrohman 109-118
- 9.) POLITIK MULTIDIMENSI DAN KEHANCURAN BAGHDAD
: Membaca Ulang Sejarah Peradaban Islam Era Abbasiyah
Supandi 119-132

MODERASI ISLAM UPAYA PENCARIAN PERAN PTAI DALAM MENANGKAL RADIKALISME AGAMA

Oleh: Didin Nurul Rosidin*

Abstracts: *Islamic studies can play a role in the moderation of thought. This is done by presenting a critical and comprehensive study of the teachings of Islam. Perspective enriched with humanitarian tradition, local wisdom, and modern social realities that are more respectful of human rights. In this way, the study of Islam can enter into their thinking space and can further moderate radicalism. Muslim intellectuals are expected to become a cultural broker for the Muslim people, so the available options more inclusive theological and prioritize universal values. This article would like to emphasize the contribution of Islamic studies in warding off religious radicalism. Islamic studies is rich in moral messages for peace, integration, and humanitarian.*

Keywords: kajian Islam, radikalisme, Islam, fundamentalisme, gerakan budaya

A. Pendahuluan

Tepat pada hari ini 14 tahun yang lalu dunia terguncang oleh peristiwa hancurnya World Trade Center (WTC), salah satu simbol kedigdayaan negara superpower, Amerika Serikat, dengan segala prinsip dan sistem yang dianut. Dua pesawat terbang dengan kekuatan dahsyatnya menghantam menara kembar tersebut. Tidak saja bangunan tersebut hancur dan rata dengan tanah, tetapi juga ribuan nyawa yang berada di dalam maupun sekitarnya tewas secara mengerikan. Serta merta, seluruh dunia mengutuk peristiwa ini. Tidak sedikit negara di dunia, khususnya aliansi utama Amerika Serikat, menunjukkan dukungan kuat mereka dengan menyediakan segala sumberdaya untuk menghancurkan kekuatan yang dipandang oleh Amerika Serikat sebagai pelaku pengeboman tersebut.

Apa yang terjadi di Amerika ternyata terjadi juga di Indonesia. Tidak lama setelah tragedy WTC, muncul tragedi yang hampir sama di beberapa tempat di Indonesia seperti Bom Bali, Bom Kuningan, Bom JW Marriot dan lain-lain. Sama seperti di Amerika, banyak korban berjatuh. Tidak sedikit diantaranya orang Muslim. Namun sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika, peristiwa-peristiwa di Indonesia ternyata pelakunya banyak melibatkan mereka yang merupakan alumni lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren, Madrasah dan IAIN seperti Imam Samudra, Mukhlas, Amrozi, Oman Faturahman dan lain-lain. Hal terakhir ini memunculkan

*Dosen Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

pertanyaan mengapa alumni pendidikan Islam terlibat dalam tindakan terorisme? Apa yang sebenarnya terjadi dengan studi Islam di lembaga pendidikan Islam di Indonesia? Apakah studi Islam di lembaga pendidikan Islam tersebut yang telah menginstigasi para muridnya untuk bertindak kejam kepada siapapun yang dipandang berbeda? Jika ya, studi Islam yang bagaimana yang bisa meredam radikalisme yang merupakan cikal bakal terorisme?

Mengingat studi Islam di Indonesia begitu panjang sejarahnya yaitu sejak proses awal Islamisasi nusantara dan begitu luas cakupannya yang meliputi studi Islam paling elementer di level langgar/surau/meunasah/musholla/masjid, level menengah seperti pesantren dan madrasah serta sekolah umum, dan level tinggi yaitu perguruan tinggi agama Islam, makalah ini hanya memfokuskan pada studi Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik Universitas Islam, Institut Agama Islam maupun Sekolah Tinggi Agama Islam sebagai representasi studi Islam tingkat tinggi. Meskipun begitu pada bagian awal makalah ini akan sedikit dibahas tentang lembaga pendidikan pra-PTAI sebagai latar belakang sejarah studi Islam di Indonesia

B. Studi Islam di Indonesia: Brief Review

Indonesia atau nusantara merupakan wilayah yang mengalami proses Islamisasi. Beragam teori telah dikembangkan tentang proses Islamisasi wilayah ini mulai dari asal usulnya, waktu terjadinya, para pelaku utama Islamisasi, wilayah-wilayah yang pertama kali menerima Islam hingga corak Islam yang pertama kali dikenalkan di publik nusantara¹. Teori-teori Islamisasi di atas betapa dinamisnya proses nusantara. Artinya, proses Islamisasi yang secara sekilas seperti berjalan *smooth* nyatanya tidak homogen dan dalam banyak hal melalui beragam cara negosiasi mulai dari adaptasi, akulturasi bahkan sinkretisasi. Proses Islamisasi nusantara dalam pandangan Azymardi Azra yang merujuk pada konsep A.D. Nock lebih tepat disebut proses adhesi daripada konversi dimana kaum pribumi nusantara dalam memeluk agama baru (Islam) tidak serta merta melepaskan secara penuh ajaran dan praktek agama yang dianut sebelumnya². Hasilnya, wajah Islam nusantara sejak permulaan berbeda dengan wajah Islam Arab.

Lepas dari beragam proses Islamisasi yang terjadi, Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif memiliki seperangkat ajaran dan aturan yang harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh (*kaffah*) oleh para pemeluknya. Untuk itu, pendidikan Islam yang berintikan pada bagaimana mengajarkan Islam kepada pemeluknya untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah keniscayaan. Atas dasar itu, berbicara tentang Islamisasi juga berbicara tentang proses pendidikan Islam dan tentunya terkait pula lembaganya, para gurunya dan kurikulumnya.

Lebih jauh dari itu, bahwa Islamisasi tentunya bukan untuk Islamisasi itu sendiri sebagaimana seni untuk seni. Islamisasi bisa dikatakan merupakan tahap awal dari pembentukan ummat yang tidak saja mampu memanifestasikan dengan ajaran Islam secara kaffah akan tetapi juga mampu membawa kebaikan-kebaikan agung bagi seluruh manusia di dunia yang begitu heterogen dan terus berkembang. Tidak heran jika seiring dengan perubahan zaman dan ummat serta semakin berkembangnya tantangan yang dihadapi, lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat studi Islam di nusantara terus mengalami transformasi.

¹ Lihat Azymardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: Mizan, 1998, hal. 23-36.

² Didin Nurul Rosidin dkk, Islamisasi, Politik dan Kerajaan Islam Cirebon, Laporan Hasil Penelitian Balitbang Kementerian Agama RI, 2012, hal. 144-145.

Dari catatan sejarah, paling tidak ada beberapa tipologi lembaga pendidikan Islam antara lain pendidikan ala-langgar sebagai pendidikan level elementer (di berapa tempat dan keluarga kaya, pendidikan Islam elementer dengan cara mengundang ustadz ke rumah), pendidikan ala-kerajaan dimana guru diundang untuk mengajar di lingkungan Keraton dan diperuntukkan untuk keluarga atau paling tidak mereka yang tinggal di Keraton, pendidikan pesantren sebagai level menengah dan atau tinggi, pendidikan madrasah/sekolah untuk level menengah sebagai produk dari modernisasi lembaga pendidikan Islam pada awal abad ke 20 dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai level tertinggi mulai dari jenjang S-1 sampai dengan S-3.

1. Langgar

Langgar yang merupakan prototype mesjid sederhana merupakan lembaga pendidikan Islam tingkat dasar. Di tempat ini, peserta didik adalah mereka yang berusia anak-anak antara 5 sampai dengan 12 tahun. Mereka diajarkan hal-hal elementer dalam bidang ilmu-ilmu keIslaman mulai dari tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik, menulis huruf Arab, beberapa kaidah dasar ilmu Nahwu, Sharaf, konsep-konsep dasar Aqidah (rukun Iman), rukun Islam dan beberapa praktek ibadah utama dan konsep dasar Fiqh Islam. Di nusantara, ada nama lain terkait dengan lembaga pendidikan Islam dasar ini antara lain Surau, Meunasah dan Musholla. Sebagaimana Langgar yang populer di Jawa, lembaga pendidikan Islam seperti Surau, Meunasah dan Musholla juga mengajarkan hal-hal dasar dalam Ilmu KeIslaman³.

Meskipun sistem pendidikan langgar ini merupakan pendidikan dasar, nyatanya sebagian besar kaum Muslim mencukupkan diri untuk belajar agama pada level ini. Hanya sebagian kecil yang kemudian berinisiatif untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pesantren. Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat serta munculnya lembaga pendidikan Islam dasar yang baru terutama madrasah, keberadaan langgar sebagai pusat studi Islam tingkat dasar mengalami kemerosotan. Banyak orang tua murid yang mencukupkan diri dengan mengirimkan anak-anak mereka ke madrasah baik ibtidaiyah maupun diniyah ula ataupun Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Akibatnya, pada dua dekade terakhir, banyak langgar "terpaksa" memperluas mandatnya mengadopsi, atau lebih tepatnya mengimplantasi, sistem pendidikan Islam yang baru baik dalam bentuk program diniyah ataupun TPA.

2. Pesantren

Sejatinya, prototype pendidikan Islam telah muncul sejak permulaan Islamisasi dengan menggunakan beberapa istilah yang berbeda seperti padepokan dan pengguran⁴. Namun secara institusi, pesantren menurut Martin van Bruinessen sebagaimana dikutip oleh Zulkifli baru berkembang pada pertengahan abad ke 18⁵. Kata pesantren sendiri bukan merupakan istilah yang berasal dari serapan bahasa Arab, akan tetapi bahasa sangsekerta yang artinya tempat mereka yang belajar agama. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan telah ada sejak sebelum Islam datang dan dikhususkan bagi mereka yang ingin menjadikan diri mereka sebagai seorang yang ahli agama⁶.

³ Azymardi Azra, *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*, Bandung: Mizan, 2006, hal. 64-65.

⁴ Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009, hal. 28.

⁵ Zulkifli, *Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java*, Leiden: INIS, 2002, hal. 2

⁶ Azyumardi Azra, *Islam in the Indonesian World...*, hal. 70.

Dalam konteks jenjang studi Islam, pesantren secara umum merupakan jenjang lanjutan dari pendidikan dasar seperti langgar, surau, meunasah dan musholla. Hal itu juga bisa terlihat dari materi pembelajaran yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah diperoleh oleh murid pada level dasar. Di pesantren mereka mulai bersentuhan dengan konsep dan ajaran Islam yang lebih kompleks baik ilmu Aqidah, Ilmu Fiqh, Ilmu Akhlak, Tafsir dan Hadits. Dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut, para santri merujuk dan mengkajinya pada kitab kuning yang ditulis oleh para ulama agung masa lalu. Para santri memang sejak awal disiapkan untuk menjadi kader-kader ulama yang paling tidak untuk tempat asal santri dan jika memungkinkan untuk level yang lebih tinggi.

Berbeda dengan langgar, para santri di pesantren juga diharuskan untuk tinggal menetap di asrama yang telah disediakan oleh Kiyai sebagai pimpinan sekaligus pengelola pesantren. Selama 24 jam sehari mereka terus mendapatkan bimbingan dan arahan baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dari Kiyai atau paling tidak asisten kiyai yang merupakan santri paling senior yang dipilih oleh kiyai untuk membantunya. Tidak heran jika pesantren paling tidak memiliki lima elemen penting antara lain Kiyai, Santri, Kitab Kuning, Asrama dan Mesjid.

Hal lain yang menarik dari pesantren adalah jaringan intelektual yang terbentuk melalui hubungan guru dan murid. Banyak pesantren di pulau Jawa khususnya dan pulau lainnya di nusantara memiliki hubungan ini. Misalnya banyak pesantren yang nantinya menjadi basis dukungan NU merupakan pesantren yang dibangun oleh alumni pesantren Tebuireng, Syekh Hasyim Asy'ari. Jaringan ini pula menjadi landasan yang kokoh bagi terciptanya jaringan ulama yang lebih luas. Melalui jaringan pesantren karya-karya para ulama di Timur Tengah diajarkan. Pada saat yang sama, melalui jaringan itu pula para santri membangun legitimasi intelektual yang sampai pada ulama Timur Tengah⁷.

Dari gambaran di atas, tentunya kurang tepat jika kemudian kita menyimpulkan bahwa pesantren bersifat homogen baik dari sisi sistem dan standar isi akademik maupun ideologi yang dikembangkan. Seringkali kita mendengar tipologi pesantren kedalam dua arus besar yaitu tradisional atau salafiyah dan modern atau 'Ashriyah. Namun nyatanya begitu kompleks pesantren dari sisi tipologi kelembagaan saja, apalagi jika dikaitkan dengan muatan kurikulum dan orientasi ideologisnya. Kita juga seringkali terjebak pada pemahaman bahwa pesantren identik dengan NU. Nyatanya, banyak ormas lain yang juga membangun system pendidikan pesantren dan banyak pula pesantren yang tidak memiliki afiliasi apapun dengan ormas Islam manapun. Lebih jauh dari itu, tidak sedikit pesantren yang justru memiliki afiliasi dengan jaringan internasional.

Begitu kompleksnya pesantren juga sering menyebabkan kesalahfahaman di masyarakat, para sarjana bahkan para pengambil kebijakan. Misalnya, ketika beberapa pelaku terorisme itu adalah lulusan pesantren, muncul asumsi bahwa pesantren merupakan sarang terorisme. Akibatnya, untuk beberapa waktu, pesantren diawasi dan diselidiki. Menyikapi hal tersebut, para pengelola pesantren berbondong-bondong mendaklarasikan sikap penolakan mereka terhadap segala bentuk aksi terror atas nama agama dan menolak paham radikal dalam agama.

⁷ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hal. 88-93.

3. Madrasah

Dalam sejarah kelembagaan pendidikan Islam, madrasah sejatinya telah ada sejak awal abad ke 11 M di beberapa wilayah Islam di Timur Tengah. Salah satu madrasah yang menjadi rujukan akan betapa besarnya pengaruh dan kontribusi madrasah dalam perkembangan pendidikan Islam adalah Madrasah Nidhomiyah yang dibangun oleh Nidzam al-Muluk dimana salah seorang Guru Besarnya adalah Imam Al-Ghazali⁸. Meskipun begitu panjang sejarah lembaga pendidikan Islam ini di dunia Islam, madrasah sebagai sebuah sistem pendidikan Islam tersendiri baru berkembang di Indonesia pada decade pertama abad ke 20. Salah satu madrasah paling awal adalah Manba'ul Ulum di Solo yang didirikan pada tahun 1905.

Sistem madrasah di Indonesia kemudian berkembang pada dekade-dekade berikutnya seperti Madrasah Mathla'ul Anwar yang pertama kali dibuka tahun 1916 dan cabang-cabangnya berkembang di wilayah Banten, Bogor, Karawang hingga Lampung bagian selatan. Tidak ketinggalan, PUI juga mendirikan madrasah di Majalengka pada akhir dekade kedua abad ke 20. Nahdlatul Ulama (NU) mendirikan lembaga federasi khusus madrasah dengan nama Al-Ma'arif sekaligus menyusun jenjang pendidikannya mulai dari 'Ula, Wushta hingga Ulya.

Pendirian madrasah merupakan respon para tokoh Muslim terhadap berkembangnya sistem pendidikan "sekuler" Belanda. Massifnya pendirian sekolah ini telah mengkhawatirkan para ulama akan semakin termarginalnya umat Islam di bidang pendidikan karena pada saat yang sama pesantren sebagai pusat studi Islam justru lebih banyak mendapatkan tekanan dan pengawasan dari pemerintah Kolonial dan semakin menurunnya animo pemuda Muslim untuk masuk ke pesantren yang dinilai sebagai lembaga yang "kolot". Tidak heran jika madrasah dalam sistem pendidikannya mengadopsi sistem klasikal sebagaimana sekolah Belanda. Kurikulumnya juga lebih terbuka terhadap ilmu-ilmu umum⁹.

Dibandingkan dengan pesantren yang telah berabad-abad sebagai pusat studi Islam, madrasah nyatanya mendapat tempat lebih tinggi dalam struktur pendidikan nasional Indonesia merdeka, meskipun juga harus menyesuaikan dengan berbagai standar dan aturan yang berlaku. Akibatnya, madrasah lebih banyak mendapatkan perhatian pemerintah baik dari sisi bantuan finansial maupun sumber daya manusia. Para alumni madrasah juga relative diperlakukan sejajar dengan mereka yang lulusan dari sekolah-sekolah umum yang diakui pemerintah baik yang dikelola oleh swasta maupun negara.

Namun demikian, madrasah yang pada awalnya sebagai pengembangan dari pesantren nyatanya harus banyak berkorban demi untuk diakui pemerintah. Misalnya, melalui standar tenaga pendidik, seluruh guru madrasah haruslah lulusan perguruan tinggi. Akibatnya, banyak guru yang tidak bergelar sarjana, meskipun secara keilmuan lebih dari cukup, harus tergeser. Inilah yang oleh Karel Steenbrink disebut dengan istilah "Dari Kiyai Menjadi Sarjana"¹⁰. Contoh lainnya adalah muatan kurikulum dimana madrasah harus sepenuhnya mengadopsi standar kurikulum pemerintah termasuk perubahan komposisi yaitu 70% umum dan 30% agama. Referensi yang digunakan juga harus merujuk pada referensi yang sudah disahkan oleh pemerintah. Hasilnya madrasah dewasa ini tidak bisa lagi diharapkan akan melahirkan kader ulama tetapi lebih diharapkan akan melahirkan mereka yang memiliki karakter ulama¹¹.

⁸ Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 48-50.

⁹ Amirwan, "Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia," dalam Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 262.

¹⁰ Didin Nurul Rosidin, *From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla'ul Anwar, 1916-1998*, Unpublished Ph.D Thesis, Leiden University, 2007, hal. 194

¹¹ *Ibid.*, hal. 197

Dari gambaran tersebut, munculnya para pelaku terorisme atas nama agama yang berasal dari madrasah tentunya memunculkan pertanyaan besar. Bukankah secara kurikulum dan standar tenaga pendidikan madrasah sudah "hampir" sama dengan sekolah umum. Jika masih juga melahirkan mereka yang berfaham radikal, tentunya ada faktor lain yang berperan dibandingkan dengan hanya memfokuskan pada sisi akademik madrasah.

C. PTAI sebagai Pusat Studi Islam Tingkat Tinggi

Setelah kita membahas berbagai lembaga pendidikan Islam sebagai pusat studi Islam pada level dasar dan menengah, kini kita masuk pada uraian khusus tentang PTAI sebagai lembaga pendidikan Islam tinggi sekaligus pusat studi Islam tingkat tinggi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, PTAI sebagai salah satu pusat studi keislaman dalam perkembangannya tidak bisa lepas dari perkembangan keilmuan yang berkembang di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Pada saat yang sama, PTAI juga memiliki peran dalam proses transformasi pemikiran keislaman di Indonesia. Misalnya, PTAI secara geneologis tidak lepas dari sistem pendidikan pesantren yang telah berkembang di nusantara selama beberapa abad. Jika merujuk pada cita-cita Dr. Satiman sebelum kemerdekaan akan lahirnya *Pesantren Luhur*, PTAI merupakan perwujudan dari *Pesantren Luhur* tersebut¹². Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat tinggi PTAI tidak saja telah melahirkan para sarjana yang berperan penting dalam transformasi intelektual Islam di Indonesia, tetapi juga telah melahirkan berbagai macam pemikiran Islam yang banyak telah merubah wajah Islam di Indonesia. Kedua peran PTAI terus berkembang sesuai dengan tuntutan yang muncul sejak didirikan pada dakede 1960-an hingga sekarang dan pada masa mendatang.

Sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan pesantren, PTAI merupakan tempat bagi para alumni pesantren untuk melanjutkan studinya dalam bidang agama. Mayoritas mahasiswa dan juga para dosennya merupakan alumni pesantren. Ketika PTAI pada awal tahun 1990-an mensyaratkan ijazah SMA atau MA untuk bisa masuk, banyak kiyai yang membuka sekolah atau madrasah pesantrennya yang dengan itu para alumninya memiliki kesempatan untuk tetap melanjutkan studinya ke PTAI, meskipun kebijakan rekrutmen ini pada awalnya telah menuai protes keras dari komunitas pesantren¹³.

Sebagai kelanjutan dari pesantren, PTAI pada awalnya tidak bisa lepas dari tradisi keilmuan pesantren yang banyak mengadopsi dari tradisi keilmuan Hijaz abad ke 19. Namun bukan berarti sepenuhnya diadopsi karena dari sisi kelembagaan IAIN lebih Nampak sebagai "cabang" Universitas Al-Azhar Cairo dalam pola pembagian fakultas dan sistem evaluasi tahunan yang diterapkan. Hal itu tidak lepas bahwa sejak awal abad ke 20 ketika Wahabisme mendominasi tanah Arab, para pelajar Indonesia banyak yang mengalihkan pendidikan lanjutannya ke Al-Azhar. Tidak heran jika ketika Kementerian Agama RI dibuka, banyak alumni Al-Azhar yang menduduki posisi penting dalam menentukan. Mereka inilah yang menyusun *blueprint* PTAI sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam¹⁴.

¹² Johan Meuleman, "The Institut Agama Islam Negeri at the Crossroads: Some Notes on the Indonesian State Institutes for Islamic Studies," in Johan Meuleman (ed.), *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, Jakarta: INIS, 2001, hal. 288

¹³ *Ibid.*, hal. 285

¹⁴ *Ibid.*, hal. 284

Dengan kerangka demikian, PTAI dibangun guna menghasilkan para sarjana Islam yang mumpuni di bidang ilmu-ilmu keislaman tradisional dan menjadi pendakwah Islam yang berkualitas sebagaimana Al-Azhar. Meskipun demikian, sekali lagi PTAI nyatanya tidak sepenuhnya mengadopsi Al-Azhar dalam struktur keilmuannya. Hal itu tidak lepas dari tuntutan nasional saat itu akan adanya tenaga pendidik Islam yang berkualitas dan berkualifikasi sarjana guna mengajar di sekolah umum pada bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) dan madrasah. Untuk itu, PTAI juga membuka Fakultas Tarbiyah guna memenuhi tuntutan tersebut. Jika dibandingkan dengan lulusan fakultas lainnya, lulusan fakultas Tarbiyah lebih ditekankan pada aspek kemampuan mendidik dan mengajar dibandingkan dengan penguasaan khazanah keislaman yang kompleks¹⁵.

Seiring dengan perkembangan zaman dan sebagai bagian dari upaya untuk mendudukkan PTAI sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi di Indonesia sebagaimana perguruan tinggi lainnya, para pemangku PTAI mulai melakukan berbagai reformasi PTAI baik dari sisi kelembagaan maupun kurikulum. PTAI kemudian tidak lagi "terjebak" pada tuntutan pragmatis seperti menghasilkan para muballigh (ustadz) atau ulama dalam arti sempit sebagai ahli ilmu agama dan guru agama yang merupakan bagian dari *social expectation*. PTAI juga dituntut untuk menghasilkan ilmuwan Islam yang memiliki kapasitas ilmiah sesuai dengan standard dan bidang keahlian yang ditekuninya sebagai bagian dari *academic expectation*¹⁶.

Pada dekade tahun 1970-an dan 1980-an, dua orang begawan, Prof. Dr. Mukti Ali di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Prof. Dr. Harun Nasution di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, melakukan berbagai pembaharuan di masing-masing IAIN. Misalnya, Mukti Ali mengenalkan pendekatan ilmiah terhadap studi agama. Dengan pendekatan baru ini, Islam sebagai agama tidak saja dikaji aspek tekstual secara literal, tetapi juga difahami sebagai fenomena dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Mukti Ali memberikan perspektif non-doktrinal dalam memahami apa yang berkembang dalam masyarakat Islam.

Sementara itu, Harun Nasution menjadikan Islam sebagai obyek studi ilmiah yang rasional dan dinamis karena harus didekati dengan berbagai pendekatan ilmiah sekaligus kebenarannya harus berdasarkan pada rasio dan bersifat relatif. Dengan begitu, kajian-kajian keislaman menjadi terbuka atas beragam pandangan. Para mahasiswa dituntut untuk bersikap kritis dalam mengkaji Islam, bahkan termasuk pada hal-hal yang prinsip sekalipun seperti Rukun Iman. Untuk itu, Harun Nasution melakukan reformasi kurikulum. Bahkan tidak itu saja, pada masanya pula dibuka program paska sarjana yang akan menjadi pionir bagi proses peningkatan mutu para dosen tidak saja IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan tetapi di seluruh PTAI di Indonesia, tetapi juga sebagai media penyebaran ide-ide pembaharuan Islam ke seluruh pelosok Indonesia¹⁷.

Apa yang dilakukan oleh kedua begawan di atas tentunya tidak berjalan mulus sebagaimana yang dibayangkan. Ada banyak penolakan terhadap keduanya baik dari internal PTAI¹⁸ maupun masyarakat Islam Indonesia. Salah seorang hingga terus mengkritik kebijakan Harun Nasution adalah Hartono Ahmad Jaiz. Dalam bukunya, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Hartono menyorot pembaharuan yang dilakukan oleh Harun Nasution di IAIN ini dengan istilah Harunisme. Ia juga

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Wisnarni, "Pembaharuan Sistem Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Telaah Konversi IAIN ke UIN", dalam Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 338.

¹⁷ Saiful Muzani, "Mu'tazilah Theology and the Modernization of the Indonesian Muslim Community: Intellectual Portrait of Harun Nasution," *Studia Islamika* 1 (1) April-June 1994, Hal. 101-106

¹⁸ Ibid.

menuduh Harun Nasution beserta beberapa dosen IAIN seperti Nurcholish Madjid, Kautsar Azha Noer, Zainun Kamal dan lain-lain sebagai agen barat yang mencoba menyesatkan umat Islam melalui pendidikan di IAIN¹⁹.

Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kedua tokoh lulusan Universitas Barat ini semakin menguat seiring dengan dukungan akan perlunya pembaharuan pemikiran Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dua orang tokoh nampaknya patut disebutkan secara khusus yaitu Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Munawwir Sadzali. Pada awal tahun 1970-an, Nurcholish Madjid muda yang saat itu dikenal sebagai Natsir Muda menyodorkan konsep "Islam Yes, Partai Islam No". Konsep ini merupakan otokritik terhadap upaya sakralisasi politik oleh para tokoh Islam saat itu.

Sementara itu, Prof. Munawwir Sadzali mengusung ide kontroversialnya yang dikenal dengan istilah Reaktualisasi Hukum Islam. Melalui ide itu, Munawwir Sadzali menawarkan perlunya penafsiran baru atas hukum Islam dengan memperhatikan aspek keadilan dan adat. Salah satunya contohnya adalah tentang pembagian warisan antara anak perempuan dan laki-laki. Dalam pandangannya dengan menekankan aspek keadilan, anak perempuan tidak mesti menerima setengah dari apa yang diterima oleh laki-laki, jika yang kedua pada kenyataannya telah menghabiskan banyak biaya selama ini dibandingkan dengan perempuan. Upaya untuk memahami Islam secara lebih kontekstual dipandang lebih tepat guna menjadikan Islam sebagai agama yang mampu menjawab segala persoalan dan tantangan zaman²⁰.

Selain itu melalui ide, Munawwir Sadzali yang saat itu menjadi Menteri Agama selama dua periode melakukan langkah berani guna melakukan reformasi PTAI dengan mengirimkan dosen dan alumni PTAI ke berbagai perguruan tinggi di Barat seperti McGill University Kanada, Leiden University Belanda dan beberapa perguruan tinggi di Amerika dan Australia. Hal itu tidak berarti bahwa Kementerian Agama menutup pintu untuk studi lanjutan ke Timur Tengah. Hanya saja karena berbagai hambatan yang terjadi, arus pengiriman dosen ke perguruan tinggi Barat lebih intensif daripada ke Timur Tengah.

Salah satu tujuan utama pengiriman dosen dan alumni IAIN ke Barat ini adalah untuk "menjembatani gap budaya dan intelektual antara para ilmuwan Muslim yang memiliki keahlian di bidang keilmuan non-agama yang sebagiannya adalah hasil didikan pendidikan tinggi Barat dan terbiasa dengan tradisi keilmuan Barat dengan mereka yang selama ini telah terdidik di lembaga pendidikan tinggi Islam (IAIN)"²¹. Dengan kata lain, kebijakan Kementerian Agama tersebut akar "memperluas wawasan intelektual para sarjana ilmu keIslaman dan mengenalkan tradisi keilmuan di Barat yang kritis sebagai metodologi dalam melakukan studi-studi ilmu keIslaman yang menjadi bidang mereka"²². Hasilnya, studi Islam di IAIN mengalami perubahan luar biasa. Berbagai even dan kajian Islam dengan pendekatan ilmiah semakin intensif dilakukan. Pada momen itulah, banyak

¹⁹ Lebih lengkap dan detil tentang "tuduhan" pemurtadan ini, lihat Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

²⁰ Anonymous, "Pancasila as an Islamic Ideology for Indonesian Muslim: An Interview with Munawwir Syadzali," *Studia Islamika* 1 (1), April-June 1994, hal. 187-190.

²¹ Johan Meulaman, "The Institut ...", hal. 287

²² Ibid.

hasil penelitian para sarjana PTAI dipresentasikan dalam bahasa internasional. Sejak saat itula, banyak karya para sarjana PTAI baik dalam bentuk makalah, artikel maupun buku yang bisa diakses dan diperhitungkan pada level internasional.

Terkait dengan maraknya pendekatan interdisiplin ilmu dalam mengkaji Islam, telah muncul sejak pertengahan tahun 1990-an gerakan untuk mentransformasikan PTAI menjadi sebuah universitas yang didalamnya seluruh ilmu bisa dikaji dan dikombinasikan. Gerakan tersebut secara filosofis ingin mengembangkan apa yang disebut integrasi keilmuan. Gerakan ini secara langsung menolak pembagian ilmu kedalam dua blok besar yang telah lama tertanam dalam masyarakat Islam yaitu ilmu agama dan ilmu umum (sekuler). Hal itu pula yang selama ini telah "berhasil" memisahkan dunia madrasah dengan sekolah dan memisahkan ulama/kiyai dengan Ilmuwan. Munculnya UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga dan UIN-UIN lainnya sejak awal tahun 2000-an merupakan jawaban awal atas kegelisahan terkait dengan dikotomi ilmu ini, meskipun tidak berarti semuanya sudah jelas dan final karena rumusan integrasi keilmuan pun masih terus berkembang dan dikembangkan²³.

D. Tiga Wajah Radikalisme²⁴ Agama

Dengan gambaran umum tentang studi Islam di atas mulai dari level dasar hingga tingkat tinggi, kini kita melihat bagaimana gerakan radikalisme agama, bagaimana sejarah munculnya berikut akar-akar penyebabnya dan bagaimana karakteristiknya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran secara lebih utuh tentang gerakan tersebut seraya kita mencari jawaban dari pertanyaan utama yaitu bagaimana peran studi Islam khususnya pada level PTAI untuk mencegah tumbuhnya paham radikalisme tersebut.

Secara historis, gerakan radikal dalam agama telah terjadi sejak masa paling awal dari sejarah agama tersebut. Islam mengenal kelompok khawarij yang bergerak untuk memaksakan ide dan keyakinan mereka, meskipun dengan cara yang justru bertentangan dengan prinsip utama Islam sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin*. Yang menariknya bahwa tujuan akhir dari gerakan radikal ini dalam pandangan Bassam Tibi adalah *non-religious* atau sekuler yaitu terbentuknya struktur dan sistem politik yang dengan itu para pengusung gerakan radikal dapat menerapkan tata kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya menurut kepentingan mereka²⁵.

Terkait dengan gerakan radikal Islam kontemporer tidak lepas kebangkitan agama (*Religious Revival*) pada dekade 1970-an dan terutama 1980-an. Yang menarik adalah bahwa fenomena tersebut tidak saja terjadi di kalangan agama samawi seperti Yahudi, Kristen maupun Islam, tetapi juga agama lainnya. Kaum Kristen misalnya menjadi kembali rajin untuk datang ke gereja²⁶. Begitu pula kaum Muslim merasa "bahagia" dengan berbagai atribut keagamaan seperti hijab bagi

²³ Wisnarni, "Pembaharuan Sistem Pendidikan ...," hal. 342-347.

²⁴ Dalam makalah ini saya lebih sering menggunakan gerakan radikal atau radikalisme untuk menyebut kelompok yang juga sering disebut Fundamentalis/fundamentalisme, Revivalis/revivalisme dan Islamis/Islamisme.

²⁵ Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Berkeley: University of California Press, 1998, hal. ix

²⁶ Jamhari, "Mapping Radical Islam in Indonesia," dalam *Studia Islamika* vol. 10. No. 3, 2003, hal 5.

perempuan dan koko bagi laki-laki. Khusus di Indonesia, para pengelola TV yang menguatkan semangat keagamaan dengan mengadakan beragam program keagamaan. Pada situasi seperti inilah, muncul dai-dai selebritis yang selalu dielu-elukan oleh fans-nya.

Kebangkitan agama ini tidak lepas dari ketidakpuasan terhadap modernisme yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang netral nilai, termasuk netral agama. Para tokoh agama mengkritik modernisme yang kering akan makna spiritual dan lebih dari itu menjadi penyebab carut marutnya dunia akibat merosotnya etika dan tidak pedulinya terhadap kelestarian alam semesta. Singkatnya, modernisme yang berideologikan positivisme, sekularisme, hedonisme, dan kapitalisme telah dipandang gagal membawa dunia ke arah yang lebih baik, manusiawi dan ketentraman sebagaimana yang telah dijanjikan. Pada titik inilah, agama dipandang sebagai jalan terbaik guna menjawab kegelisahan modernisme.

Dalam konteks kebangkitan agama inilah lahir "bayi yang tak bisa dihindari" yaitu gerakan fundamentalis atau radikal. Menurut Jamhari, semua agamanya nyatanya menghadapi kenyataan yang sama seperti menguatnya kelompok Zionis di Israel, kebangkitan Islam militan di dunia Islam, konflik Protestan dan Katolik di Irlandia Utara dan semakin populernya "Televangelis" Amerika²⁷. Di Indonesia yang sejak awal tidak netral dengan agama, fenomena radikalisme juga sangat jelas terlihat dengan munculnya organisasi-organisasi radikal seperti FPI, Lasykar Jihadi Majelis Mujahidin dan lain-lain. Gerakan mereka berkembang dengan pesat dan cukup dominan dalam wacana-wacana keagamaan di publik baik melalui penerbitan buku-buku, majalah, pamflet, acara-acara keagamaan baik di mesjid maupun media massa.

Struktur doktrin yang kompleks dan kondisi sosial politik yang berbeda dan berkembang plus beragamnya kemampuan dalam memahami pesan suci dalam kitab suci telah melahirkan beragam aliran pemahaman, pemikiran dan pengamalan agama di semua agama, termasuk tafsir agama ala-fundamentalis dan tafsir agama kelompok moderat dan lain-lain.

Salah satu pemahaman kelompok fundamentalis adalah hanya berdasarkan pada bunyi teks tanpa berupaya untuk memahami makna teks tanpa banyak melakukan interpretasi lebih jauh karena para ulama mereka menolak penggunaan akal dalam menafsirkan teks-teks suci tersebut. Mereka juga menegaskan konteks sosial, politik dan sejarah dimana ajaran agama diterapkan pada masa lalu. Untuk itu, tujuan utama mereka adalah kembali menghadirkan masa lalu pada masa sekarang dan akan datang. Bagi mereka, sejarah manusia itu tunggal dan berlaku untuk setiap masa hingga akhir zaman. Sikap *rigid* mereka termanifestasikan pada penolakan mereka ide dan pemikiran para tokoh ulama dan pemikir Islam selain dari "guru-gurunya". Tidak jarang, sebagian kelompok fundamentalis memandang kaum Muslim yang bukan kelompok dan atau yang berbedanya pemahamannya disebut kafir. Atas dasar itu, mereka berhak menyerang kelompok yang "kafir" tersebut.

Dengan kerangka ini, gerakan radikal sebagai gerakan agama (*Religious Movement*)²⁸. Namun demikian, jika gerakan ini hanya berhenti pada "perang wacana dan klaim kebenaran" mungkin tidak kita tidak terlalu mengkhawatirkan karena perdebatan "keras" seperti itu juga terjadi pada

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid., hal. 23-24.

masyarakat dan peradaban lainnya seperti bagaimana radikal dan revolusionernya konsep-konsep gerakan yang diusung oleh Marksisme dan atau filsafat eksistensialisme yang tidak saja menagaskan agama tetapi Tuhan sekaligus.

Untuk itu, perlu digarisbawahi bahwa pemahaman tekstual tidak serta merta menyatakan bahwa para pengusungnya adalah kelompok radikal dan berupaya untuk "memaksakan" ideologi mereka pada seluruh kaum Muslimin. Ada banyak faktor lainnya yang kemudian mendorong para tekstualis ini bertindak secara radikal. Para sarjana telah berupaya untuk mencari jawaban mengapa seorang atau sekelompok Muslim memilih jalan yang radikal guna mewujudkan pandangan idealitas mereka.

Salah satunya adalah rasa frustrasi akan kondisi ekonomi yang mendera mereka serta ketidakmampuan negara mewujudkan masyarakat ideal yang dijanjikan. Ada banyak kasus dimana para militan bertindak radikal sebagai wujud protes akan kondisi ekonomi mereka. Para pelaku berlatar belakang keluarga yang tidak mampu. Dalam pandangan mereka, kemiskinan yang mereka derita merupakan kemiskinan struktural. Artinya kata pemiskinan merupakan kata yang lebih tepat daripada kemiskinan. Pemerintah yang memiliki segala sumber daya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera justru gagal melakukan tersebut. Korupsi dan diskriminasi menjadi contoh bagaimana pemerintah tidak berhasil untuk mewujudkan masyarakat yang adil tersebut.

Faktor lainnya lebih bersifat politis dimana kekecewaan terhadap sistem politik baik pada level global maupun nasional yang tidak adil. Pada level global, kelompok radikal sering menjadikan barat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi umat Islam di dunia yang terbelakang. Memori penjajahan Barat atas dunia Islam terus "menghantui" pendekatan kelompok ini terhadap tata politik global. Salah satu isu yang paling penting dirujuk adalah kasus Palestina dimana Barat gagal menjamin hak asasi warga Palestina dan membiarkan Israel bertindak sewenang-wenang. Belum lagi ditambah seringnya Barat mengintervensi urusan rumah tangga negara-negara Islam guna memastikan kepentingan Barat terjamin tidak peduli apapun nasib yang menimpa penduduk lokal di negara-negara tersebut.

Dalam konteks ini, wacana utama gerakan radikal sebenarnya persoalan politik ekonomi. Sehingga gerakan radikal lebih tepat disebut gerakan politik (*Political Movement*)²⁹. Agama dalam gerakan tersebut lebih tampak sebagai *cover* atau baju atau lebih dari itu sebagai sumber legitimasi atas ketidakpuasan mereka atas apa yang mereka rasakan dan saksikan.

Faktor lainnya yang juga dipandang memiliki peran adalah ketidaksiapan menghadapi perubahan yang terjadi pada kaum Muslim. Arus modernisasi yang berujung pada arus globalisasi telah banyak merubah wajah masyarakat Islam. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dikedepankan daripada dalil-dalil agama. Karenanya, modernisasi dan globalisasi dituding sebagai penyebab semakin minimnya peran ajaran agama dalam kehidupan kaum Muslim. Bahkan, jika merujuk pada pandangan kaum sekularis yang meyakini bahwa agama bukan menjadi wilayah publik tetapi wilayah pribadi individu masing-masing, agama seperti tidak diperkenankan berperan dalam ranah dan kepentingan umum. Padahal Islam justru tidak saja datang untuk kebaikan pribadi

²⁹ Ibid., hal. 20-21.

masyarakat dan peradaban lainnya seperti bagaimana radikal dan revolusionernya konsep-konsep gerakan yang diusung oleh Marksisme dan atau filsafat eksistensialisme yang tidak saja menagaskan agama tetapi Tuhan sekaligus.

Untuk itu, perlu digaribawahi bahwa pemahaman tekstual tidak serta merta menyatakan bahwa para pengusungnya adalah kelompok radikal dan berupaya untuk "memaksakan" ideologi mereka pada seluruh kaum Muslimin. Ada banyak faktor lainnya yang kemudian mendorong para tekstualis ini bertindak secara radikal. Para sarjana telah berupaya untuk mencari jawaban mengapa seorang atau sekelompok Muslim memilih jalan yang radikal guna mewujudkan pandangan idealitas mereka.

Salah satunya adalah rasa frustrasi akan kondisi ekonomi yang mendera mereka serta ketidakmampuan negara mewujudkan masyarakat ideal yang dijanjikan. Ada banyak kasus dimana para militan bertindak radikal sebagai wujud protes akan kondisi ekonomi mereka. Para pelaku berlatar belakang keluarga yang tidak mampu. Dalam pandangan mereka, kemiskinan yang mereka derita merupakan kemiskinan struktural. Artinya kata pemiskinan merupakan kata yang lebih tepat daripada kemiskinan. Pemerintah yang memiliki segala sumber daya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera justru gagal melakukan tersebut. Korupsi dan diskriminasi menjadi contoh bagaimana pemerintah tidak berhasil untuk mewujudkan masyarakat yang adil tersebut.

Faktor lainnya lebih bersifat politis dimana kekecewaan terhadap sistem politik baik pada level global maupun nasional yang tidak adil. Pada level global, kelompok radikal sering menjadikan barat sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi umat Islam di dunia yang terbelakang. Memori penjajahan Barat atas dunia Islam terus "menghantui" pendekatan kelompok ini terhadap tata politik global. Salah satu isu yang paling penting dirujuk adalah kasus Palestina dimana Barat gagal menjamin hak asasi warga Palestina dan membiarkan Israel bertindak sewenang-wenang. Belum lagi ditambah seringnya Barat mengintervensi urusan rumah tangga negara-negara Islam guna memastikan kepentingan Barat terjamin tidak peduli apapun nasib yang menimpa penduduk lokal di negara-negara tersebut.

Dalam konteks ini, wacana utama gerakan radikal sebenarnya persoalan politik ekonomi. Sehingga gerakan radikal lebih tepat disebut gerakan politik (*Political Movement*)²⁹. Agama dalam gerakan tersebut lebih tampak sebagai cover atau baju atau lebih dari itu sebagai sumber legitimasi atas ketidakpuasan mereka atas apa yang mereka rasakan dan saksikan.

Faktor lainnya yang juga dipandang memiliki peran adalah ketidaksiapan menghadapi perubahan yang terjadi pada kaum Muslim. Arus modernisasi yang berujung pada arus globalisasi telah banyak merubah wajah masyarakat Islam. Pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih dikedepankan daripada dalil-dalil agama. Karenanya, modernisasi dan globalisasi dituding sebagai penyebab semakin minimnya peran ajaran agama dalam kehidupan kaum Muslim. Bahkan, jika merujuk pada pandangan kaum sekularis yang meyakini bahwa agama bukan menjadi wilayah publik tetapi wilayah pribadi individu masing-masing, agama seperti tidak diperkenankan berperan dalam ranah dan kepentingan umum. Padahal Islam justru tidak saja datang untuk kebaikan pribadi

²⁹ Ibid., hal. 20-21.

muslim tetapi juga membangun suatu masyarakat yang adil berdasarkan prinsip dan ajaran Islam. Hal itu karena Islam tidak mendikotomikan dunia menjadi wilayah pribadi dan umum sebagaimana tidak mendikotomikan urusan dunia dan akhirat.

Di sini gerakan radikal lebih menampilkan sebagai perang tatanan nilai atau budaya yang seharusnya berlaku dan diberlakukan. Dalam pandangan Jamhari, gerakan radikal model ini sebagai gerakan budaya (*Cultural Movement*)³⁰ Gerakan ini mencoba untuk menjadikan *Syariat* sebagai aturan nilai sekaligus hukum guna melawan arus negatif dari modernisasi dan globalisasi. Dalam pandangan mereka, *Syari'at* Islam yang sesuai dengan pemahaman mereka merupakan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan segala bentuk krisis terutama krisis nilai dan akhlak sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Terkait dengan perbedaan kontroversial sosial dan budaya, mereka beragumen bahwa bukan *Syari'at* yang harus menyesuaikan, akan tetapi seluruh system sosial dan budaya yang harus direformasi secara radikal guna disesuaikan dengan prinsip-prinsip *Syar'iat*.

Pada level nasional dalam hal ini Indonesia, ketidakpuasan terhadap sistem politik yang memarginalkan peran politik Islam telah melahirkan beberapa gelombang gerakan radikal nusantara. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia menyaksikan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakir di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh. Penerapan sistem politik otoriter Orde Baru sedikit banyak telah berhasil mengalienasi gerakan radikal, meskipun tidak berarti tidak ada letupan-letupan yang terjadi selama tiga dekade kekuasaan Orde Baru. Ketika Orde Baru runtuh dan munculnya Reformasi yang memberikan ruang terbuka bagi setiap kelompok mengekspresikan ide dan keyakinannya, kelompok radikal sebagaimana halnya kelompok liberal dan moderat menemukan momentum untuk tampil kembali dengan wujud dan wajah yang berbeda. Nama DI/TII telah berubah menjadi FPI, Lasykar Jihad, MMI, HTI, selain tentunya organisasi yang berasal dari luar seperti Al-Qaidah, Jema'ah Islamiyah (JI) dan teroris ISIS. Mereka mengusung diterapkannya hukum *Syariat* di negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Bahkan tidak jarang, mereka juga mengusung penolakan terhadap demokrasi yang dipandang sekuler dan menggantikannya dengan sistem khilafah sebagaimana yang pernah diterapkan pada masa Islam paling awal.

Dalam upaya untuk meyakinkan kaum Muslim lainnya, kelompok radikal melakukan berbagai macam cara mulai dari penerbitan buku-buku, majalah, pamphlet hingga berdakwah ke mesjid, masjid dan kampung-kampung. Mereka juga mensponsori kegiatan-kegiatan kajian keagamaan di sekolah dan kampus-kampus guna memastikan bahwa ide-ide mereka tersebar di seluruh segmen kaum Muslim. Dalam konteks gerakan ini, nyatanya setiap kelompok tidak mesti memiliki cara yang sama, termasuk pada penggunaan kekerasan. Sebagian kelompok menolak cara-cara kekerasan dan memilih cara-cara persuasif seperti HTI. Sementara itu sebagian lainnya seperti FPI, Lasykar Jihad, JI, Al-Qaidah dan ISIS justru menghalalkan tindakan-tindakan kekerasan guna menegakkan keyakinan mereka.

³⁰ Ibid., hal. 21-22.

Dalam beberapa aspek, gerakan Syari'ahisasi dalam konteks budaya bisa dikatakan berhasil. Hal itu misalnya terlihat pada munculnya sistem ekonomi syariah. Meskipun dalam banyak aspek masih terjadi perdebatan apakah ini memang sesuai dengan syariat atau tidak, gerakan "syari'ahisasi" sistem ekonomi terus berkembang dan telah menyentuh banyak aspek kehidupan material bangsa ini. Tidak saja pada dunia perbankan, sistem syariah ini diterapkan, tetapi juga perhotelan, salon, spa, pangkas rambut dan lain-lain. Seakan-akan semuanya harus disyari'ahkan. Contoh lainnya adalah munculnya berbagai Peraturan Daerah yang dipandang bernuansa Syariah sebagaimana yang terjadi di Cianjur, Indramayu dan lain-lain³¹. Di atas semua itu, hukum Syariah secara massif dan intensif "berhasil" diterapkan di provinsi Aceh.

Namun sebagai sebuah gerakan politik yang berkeinginan untuk merubah negara, gerakan radikal belum berhasil mewujudkannya. Indonesia sejak awal memang bukanlah negara Islam sebagaimana Arab Saudi, Iran, Pakistan atau paling tidak Malaysia. Sehingga, sejak awal agama baik itu Islam atau non-Islam tidak berhasil secara penuh menjadikannya sebagai ideologi negara. Sejarah mencatat beberapa kali partai politik Islam mencoba meyakinkan rakyat Indonesia untuk mendukung ideologi mereka. Semuanya berujung pada kegagalan. Tidak pernah tercatat dalam sejarah partai Islam menjadi pemenang pemilu sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir tahun 2013. Singkatnya, jalur demokrasi adalah jalur kemustahilan bagi kelompok radikal.

Atas dasar itu, kelompok radikal banyak yang menyuarakan penolakan mereka terhadap demokrasi. Selain karena itu dipandang sebagai produk "kafir" Barat, juga menjadi faktor penyebab gagalnya untuk mentransformasikan Islam jadi negara Islam. Dalam banyak kasus dimana Islam menjadi ideologi negara, jalan demokrasi tidak pernah diterapkan. Misalnya Saudi Arabia, Pakistan, Iran. Proses awal penerapan Islam sebagai dasar negara tidak dilakukan dengan cara-cara demokratis.

E. Penutup

Di sinilah pentingnya PTAI mengusung ideologi moderasi dalam hal pemikiran keagamaan Islam. Hal itu sesuai dengan tujuan awal dibangunnya PTAI yaitu untuk bisa menghasilkan para sarjana agama yang dapat "memberikan kontribusi bagi pembangunan hubungan yang harmonis antara berbagai komunitas yang berbeda di Indonesia"³². Lebih lanjut Johan Meuleman menandakan bahwa tujuan tersebut tidak lepas dari keyakinan bahwa Islam sendiri telah berkembang melalui berbagai cara guna menyesuaikan diri dengan konteks sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Pendekatan moderasi yang didasarkan pada dinamisnya Islam beserta pemahaman atas ajarannya harus terus berlangsung di masa-masa yang akan datang³³. Untuk itu, PTAI tidak harus mengadopsi secara "buta" suatu sistem pemikiran tertentu baik yang datang dari Timur Tengah maupun Barat. Terlebih bila melihat bahwa tradisi keilmuan Islam di Indonesia sebagaimana yang terlihat pada pesantren dan juga madrasah yang begitu adaptatif terhadap tradisi dan budaya lokal di Indonesia.

³¹ Bahtiar Effendy, "Islamic Militant Movements in Indonesia: A Preliminary Accounts for Its Socio-Religious and Political Aspects," *Studia Islamika* vol. 11, no. 3, 2004, hal. 416-417

³² Johan Meuleman, "The Institut ...," hal. 285.

³³ *Ibid.*

Hal lain yang juga perlu ditegaskan sebagaimana telah dinyatakan diatas bahwa wajah atau tradisi Islam Indonesia berbeda dengan wajah Islam di belahan dunia Islam lainnya termasuk Arab yang merupakan produk dari proses Islamisasi yang kompleks, dinamis, berwarna, jika tidak boleh dikatakan penuh intrik, dan juga sebagai produk dari penafsiran para muballig Islam itu sendiri yang dituntut untuk menyesuaikan dengan lingkungan lokal tanpa menghilangkan prinsip utama ajaran Islam³⁴. Artinya, PTAI sebagai salah satu pusat studi Islam paling penting di Indonesia harus juga mempertimbangkan konteks lokal bukan sebaliknya menegasikannya dalam upaya memahami dan mengkaji prinsip dan ajaran Islam tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam.

Aspek lain meski secara langsung tidak terkait adalah kegagalan demi kegagalan politik Islam dalam peta perpolitikan nasional. Di Indonesia dimana mayoritas penduduknya Muslim politik Islam baik yang secara ideologis radikal maupun moderat seperti Masyumi, PBB, PPP dan lain-lain tidak banyak mendapatkan tempat yang menonjol. Justru partai-partai nasionalis sekuler seperti PNI, Golkar, PDI-P dan Demokrat yang silih berganti memenangi dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Sambutan yang juga relatif rendah juga terlihat pada beberapa organisasi massa yang berhaluan radikal. Atas dasar itu, Bahtiar Effendy dengan sangat yakin menyatakan bahwa meskipun dalam fase dan segmen tertentu gerakan radikal mendapatkan dukungan, akan tetapi hal itu hanya fenomena temporal³⁵.

Melihat kelima hal di atas, sebagai salah satu rujukan utama studi Islam di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, PTAI dituntut untuk mengembangkan Islam yang moderat atau melakukan moderasi Islam guna meredam radikalisme agama. *Wallahu'alam*

³⁴ Bahtiar Effendy, "Islamic Militant ...", hal. 397.

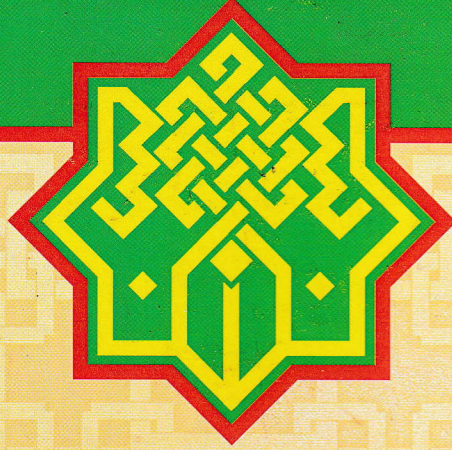
³⁵ Ibid., hal. 424.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous, "Pancasila as an Islamic Ideology for Indonesian Muslim: An Interview with Munawwir Syadzali," *Studia Islamika* 1 (1), April-June 1994.
- Amirwan, "Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia," dalam Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Asari, Hasan, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Azra, Azymardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- , *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional Formation*, Bandung: Mizan, 2006.
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Effendy, Bahtiar, "Islamic Militant Movements in Indonesia: A Preliminary Accounts for Its Socio-Religious and Political Aspects," *Studia Islamika* vol. 11, no. 3, 2004.
- Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Jamhari, "Mapping Radical Islam in Indonesia," dalam *Studia Islamika* vol. 10. No. 3, 2003.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Meuleman, Johan H., "The Institut Agama Islam Negeri at the Crossroads: Some Notes on the Indonesian State Institutes for Islamic Studies," in Johan Meuleman (ed.), *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes Towards Modernity and Identity*, Jakarta: INIS, 2001
- Muzani, Saiful, "Mu'tazilah Theology and the Modernization of the Indonesian Muslim Community: Intellectual Portrait of Harun Nasution," *Studia Islamika* 1 (1) April-June 1994.
- Rosidin, Didin Nurul dkk, *Islamisasi, Politik dan Kerajaan Islam Cirebon*, Laporan Hasil Penelitian Balitbang Kementrian Agama RI, 2012.
- , *From Kampung to Kota: A Study of the Transformation of Mathla'ul Anwar, 1916-1998*, Unpublished Ph.D Thesis, Leiden University, 2007.
- Tibi, Bassam, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*, Berkeley: University of California Press, 1998, hal. ix
- Wisnarni, "Pembaharuan Sistem Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia: Telaah Konversi IAIN ke UIN", dalam Samsul Nizar (ed.), *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zulkifli, *Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java*, Leiden: INIS, 2002.

دائِع

مجلة الدراسة الإسلامية ●●



الجامعة الإسلامية الحكومية سوراكرتا اندونيسيا